



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Dugaan Korupsi Pengamanan Abrasi Periksa 15 Saksi

Bakal Berjamaah, Tunggu Audit BPKP

RBI, BENGKULU - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu saat ini terus berupaya mengembangkan perkara korupsi dugaan pembangunan pengamanan abrasi Ipuh Kabupaten Mukomuko. Namun disinyalir penatapan tersangka dalam kasus ini akan berjamaah, dikarenakan pihak terkait dalam kasus ini lebih dari dua orang.

Dimana Kejati Bengkulu saat ini melakukan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengerjaan pembangunan pengaman abrasi pantai di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Nilainya cukup fantastik yakni mencapai Rp 90 miliar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini masuk dalam proyek multiyears atau tahun jamak yang dimulai 2017 dan 2018 lalu. Kendati

nilai yang dianggarkan sebesar Rp 90 miliar namun total nilai yang tercantum dalam kontrak Rp 87 miliar yang dilaksanakan oleh PT. Berantas'Adi Praya.

Kajati Bengkulu, Amanda Syah Arwan SH MH melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, SH mengutarakan pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu untuk mengetahui total kerugian negara (KN) atas proyek pembangunan pengaman abrasi Ipuh ini.

"Yang jelas tersangkanya akan lebih dari satu, tidak menutup kemungkinan akan berjamaah untuk tersangka ini," terang Pandoe.

Pandoe mengatakan untuk saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini

sebanyak 15 orang. Saksi ini terdiri dari PPTK juga pelaksana dan pengawas pekerjaan proyek tersebut di tahap penyidikan ini. Semua saksi ini merupakan saksi yang juga telah dilakukan pemeriksaan saat masih tahap penyelidikan. Lanjutnya dalam perkara ini pihaknya tegas dan komitmen. Siapapun yang terlibat pasti akan ditetapkan sebagai tersangka dan harus bertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya tersebut. Karena sekecil apapun bentuk penyelewengan ataupun korupsi uang negara harus dipertanggungjawabkan dan diproses hukum.

"Kalau untuk saksi telah 15 orang yang kita periksa, untuk melengkapi bukti dan data yang kita perlukan sebelum kita lakukan gelar untuk penetapan tersangka ini," imbuh Pandoe. (Bro)